



Rencana Penataan Permukiman Berbasis *Community Action Plan* sebagai Instrumen Pemulihan Pascabencana yang Berkelanjutan

Studi Kasus Huntap Satelit Desa Sibalaya Selatan, Kabupaten Sigi

Budi Andresi^{1*}, Nadine Sandra Agustina², Dita Septyana³

¹Program Studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako, Indonesia

²Prodi S1 Agroteknologi, Jurusan Budi Daya Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

³Program Studi Sains Informasi Geografi, Fakultas Sains, Teknologi Teknik dan Matematika, Universitas Mahakarya Asia, Yogyakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: budiandresy@gmail.com

Abstract. *Post-disaster settlement recovery requires more than the provision of permanent housing; it demands an integrated approach covering social, economic, institutional, environmental, and disaster risk reduction dimensions. This study analyzes the Settlement Planning Document (RPP) of the Sibalaya Selatan Satellite Permanent Resettlement Area (Huntap) in Sigi Regency, Central Sulawesi, which accommodates 118 households displaced by the 2018 Palu liquefaction disaster. The research examines the RPP as a participatory planning instrument for sustainable post-disaster recovery. A qualitative participatory approach using the Community Action Plan (CAP) method was conducted from July to November 2024 through focus group discussions, participatory workshops, formation of a Core Planning Team (TIP), field observations, document reviews, and public consultations. Data were analyzed using descriptive, infrastructure, spatial, and strengths-problems-opportunities-challenges frameworks. The findings reveal that community social capital, reflected in active organizations, social networks, and digital communication infrastructure, has been transformed into economic capital. In addition, four dimensions of community resilience economic, social, communication, and competence capacities were identified at varying levels of development. The TIP also played a strategic role in integrating the RPP into village and regional development planning. The resulting RPP contains 39 priority programs valued at approximately IDR 340.6 million for 2024-2028 across infrastructure, economic, social-environmental, and disaster risk reduction sectors. The study demonstrates that the CAP approach effectively supports sustainable settlement development and offers a replicable model for post-disaster resettlement areas in Indonesia.*

Keywords: *Community Action Plan; Community Resilience; Disaster Risk Reduction; Post-Disaster Settlement Planning; Social Capital.*

Abstrak. Pemulihan permukiman pascabencana tidak cukup dilakukan melalui penyediaan hunian tetap, tetapi memerlukan pendekatan terpadu yang mencakup aspek sosial, ekonomi, kelembagaan, lingkungan, dan pengurangan risiko bencana. Penelitian ini menganalisis Dokumen Rencana Penataan Permukiman (RPP) Huntap Satelit Sibalaya Selatan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, yang menampung 118 kepala keluarga penyintas likuefaksi Palu tahun 2018. Penelitian bertujuan mengkaji RPP sebagai instrumen perencanaan partisipatif untuk mendukung pemulihan permukiman yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif partisipatif dengan *Community Action Plan* (CAP) pada periode Juli-November 2024 melalui diskusi kelompok terarah, lokakarya partisipatif, pembentukan Tim Inti Perencanaan (TIP), observasi lapangan, telaah dokumen, dan konsultasi publik. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif, kebutuhan infrastruktur, spasial, serta kekuatan-masalah-peluang-tantangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial masyarakat yang tercermin dalam organisasi aktif, jaringan sosial, dan infrastruktur komunikasi digital berhasil dikonversi menjadi modal ekonomi. Selain itu, empat dimensi ketangguhan masyarakat, yaitu kapasitas ekonomi, sosial, komunikasi, dan kompetensi, telah terbentuk dengan tingkat perkembangan yang berbeda. TIP juga berperan penting dalam mengintegrasikan RPP ke dalam perencanaan pembangunan desa dan daerah. RPP yang dihasilkan memuat 39 program prioritas senilai sekitar Rp340,6 juta untuk periode 2024-2028 pada bidang infrastruktur, ekonomi, sosial-lingkungan, dan pengurangan risiko bencana. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan CAP efektif mendukung pembangunan permukiman berkelanjutan dan dapat direplikasi pada kawasan relokasi pascabencana lainnya di Indonesia.

Kata kunci: *Community Action Plan; Modal Sosial; Penataan Permukiman Pascabencana; Pengurangan Risiko Bencana; Resiliensi Komunitas.*

1. LATAR BELAKANG

Letak geografis Indonesia yang berada di titik pertemuan tiga lempeng tektonik besar Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik menjadikannya salah satu negara paling rawan bencana di dunia (BNPB, 2023). Gempa berkekuatan M 7,4 yang mengguncang Kota Palu dan Kabupaten Sigi pada 28 September 2018 tercatat sebagai salah satu tragedi kebencanaan terbesar dalam sejarah Indonesia: bencana ini memicu likuifaksi yang meluluhkan ribuan hunian, merenggut nyawa lebih dari 4.340 orang, dan membuat ratusan ribu warga kehilangan tempat tinggal secara mendadak (BNPB, 2018). Desa Sibalaya Selatan, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, termasuk kawasan terdampak terparah. Sebagai respons, program *Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project* (CSRRP) merelokasi 118 kepala keluarga (397 jiwa) ke Huntap Satelit seluas ± 24.747 m² yang dilengkapi infrastruktur dasar berupa SPAM, drainase, jalan lingkungan, jaringan listrik, dan ruang terbuka hijau. Namun, penyediaan fisik hunian hanyalah prasyarat awal bukan titik akhir dari proses pemulihan. Berbagai studi tentang pemulihan pascabencana secara serempak menegaskan bahwa berhasil atau tidaknya relokasi sangat bergantung pada sejauh mana komunitas mampu merajut kembali tatanan sosial, membangun sumber penghidupan, dan mengembangkan kapasitas penyesuaian diri di lingkungan barunya (Aldrich, 2012; Oliver-Smith, 1991). Kenyataan ini terkonfirmasi di lapangan: lebih dari 83% Warga Terdampak Bencana (WTB) Huntap Sibalaya Selatan berada pada tingkat kesejahteraan kategori 3 dan 4 dengan penghasilan di bawah UMK Kabupaten Sigi (Rp2.736.798), sementara sejumlah gap infrastruktur dan fasilitas sosial-komunitas masih belum terpenuhi.

Situasi tersebut memperlihatkan kelemahan mendasar dari cara pandang *yang menempatkan rumah sebagai tujuan akhir* pandangan yang mereduksi pemulihan menjadi selesainya pembangunan fisik semata, padahal seharusnya itu hanyalah titik awal dari penataan permukiman yang jauh lebih komprehensif sebuah jebakan cara pikir yang nyatanya masih kerap dijumpai dalam program relokasi di negara-negara berkembang (Lizarralde et al., 2010). Secara akademis, kajian yang mengintegrasikan perencanaan fisik huntap dengan strategi pemulihan sosial-ekonomi berbasis komunitas dalam satu kerangka dokumen perencanaan partisipatif masih sangat terbatas. Secara empiris, ketiadaan dokumen rencana penataan permukiman yang terstruktur menyebabkan warga dan pemerintah desa tidak memiliki panduan terukur untuk mengelola program pemulihan jangka menengah dan panjang, sehingga intervensi pembangunan cenderung bersifat sektoral, tidak terkoordinasi, dan tidak mencerminkan kebutuhan nyata warga. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menyusun Rencana Penataan Permukiman (RPP) Huntap Satelit Desa Sibalaya Selatan

menggunakan metode *Community Action Plan* (CAP) pendekatan perencanaan partisipatif yang menempatkan WTB sebagai subjek aktif. Dokumen RPP yang dihasilkan memuat empat bidang program prioritas secara terintegrasi infrastruktur, ekonomi, sosial-lingkungan, dan pengurangan risiko bencana (PRB) dengan rentang implementasi 2024–2028 yang melibatkan lebih dari dua belas institusi. Penelitian ini mengajukan pertanyaan utama: *bagaimana RPP Huntap Desa Sibalaya Selatan dapat berfungsi sebagai instrumen perencanaan partisipatif dalam mendukung pemulihan permukiman pascabencana yang berkelanjutan?* Secara akademis, penelitian ini memperkaya model perencanaan permukiman pascabencana yang memadukan pendekatan CAP dengan kerangka perencanaan wilayah dan kota; secara praktis, menyediakan panduan operasional bagi Pemerintah Desa Sibalaya Selatan dan Pemerintah Kabupaten Sigi dalam mengorkestrasi pemulihan yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis kebutuhan komunitas.

2. KAJIAN TEORITIS

Landasan Teori

Pemulihan Permukiman Pascabencana Berbasis Komunitas. Pemulihan permukiman pascabencana yang efektif melampaui sekadar penyediaan hunian fisik. Menurut UN-Habitat (2019), rekonstruksi yang sungguh-sungguh berhasil adalah yang sejak awal dirancang dengan melibatkan komunitas secara aktif, serta memenuhi empat prinsip dasar: aman, tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Lizarralde et al. (2010) memberikan kritik tajam terhadap cara pandang yang menyamakan pemulihan dengan selesainya pembangunan rumah, seraya mengingatkan bahwa pemulihan yang sesungguhnya harus menyentuh dimensi yang jauh lebih luas: sosial, ekonomi, sekaligus kelembagaan. Dalam kerangka inilah *Community Action Plan* (CAP) menemukan relevansinya: ia hadir sebagai wahana perencanaan partisipatif yang memastikan warga terdampak bencana (WTB) menjadi pelaku yang menentukan, bukan sekadar sasaran kebijakan yang menerima apa adanya (Wamsler, 2007; Shaw & Sharma, 2011).

Modal Sosial. Aldrich (2012) menunjukkan lewat penelitiannya bahwa kepercayaan antarsesama, tradisi saling membantu, dan rasa solidaritas yang terjalin dalam suatu komunitas terbukti lebih menentukan keberhasilan pemulihan pascabencana dibandingkan seberapa besar bantuan material yang diterima dari luar. Aldrich membedakan dua bentuk modal sosial yang saling melengkapi: *bonding social capital* (ikatan internal antarwarga) dan *bridging social capital* (jembatan dengan kelompok eksternal). Keduanya diperlukan agar komunitas tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga berkembang di lokasi baru. Oliver-Smith (1991)

menambahkan perspektif penting: rasa memiliki bersama atas sebuah identitas komunal dan kenangan kolektif tentang bencana yang pernah dialami ternyata ikut memperkuat kemampuan warga untuk merespons dan pulih dalam jangka panjang.

Resiliensi Komunitas. Norris et al. (2008) merumuskan resiliensi komunitas bukan sebagai sifat bawaan, melainkan sebagai proses yang terus bergerak dan bertumbuh, yang bertumpu pada empat kapasitas yang saling menopang: kapasitas ekonomi yang mencerminkan ragam sumber penghidupan dan ketahanan finansial warga; kapasitas sosial yang menggambarkan kekuatan jaringan dan kelembagaan yang ada; kapasitas komunikasi yang mencakup kelancaran pertukaran informasi di dalam dan antara kelompok-kelompok warga; serta kapasitas kompetensi yang mencerminkan kecakapan teknis dalam mengelola sumber daya dan program pemulihan. Resiliensi bukan kondisi statis yang dimiliki atau tidak dimiliki suatu komunitas, melainkan kapasitas yang dapat dibangun secara bertahap melalui intervensi yang tepat.

Tata Kelola Kolaboratif. Ansell & Gash (2008) mendefinisikan tata kelola kolaboratif sebagai suatu pola pengorganisasian di mana pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil duduk bersama dalam satu proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada kesepakatan bersama, karena disadari bahwa tujuan yang hendak dicapai terlalu kompleks untuk ditangani oleh satu pihak saja. Tiga prasyarat tata kelola kolaboratif yang diidentifikasi Ansell dan Gash keterlibatan multiaktor non-pemerintah, pengambilan keputusan konsensual, dan kepemilikan bersama atas hasil menjadi kerangka analitis untuk menilai efektivitas proses penyusunan dan implementasi RPP yang melibatkan lebih dari dua belas institusi.

Keempat kerangka teori ini tidak digunakan secara terpisah, melainkan secara sinergis: CAP sebagai metode operasionalisasi partisipasi, modal sosial sebagai fondasi kapital yang dimobilisasi, resiliensi sebagai kerangka pengukuran capaian pemulihan, dan tata kelola kolaboratif sebagai prinsip pengorganisasian aktor. Bersama-sama, kerangka ini membentuk lensa analitis untuk memahami RPP Huntap Satelit Sibalaya Selatan sebagai instrumen perencanaan permukiman pascabencana yang terintegrasi.

Penelitian Terdahulu

Kajian ini dibangun di atas sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan tema rekonstruksi permukiman pascabencana. Tabel 1 menyajikan perbandingan enam rujukan utama dengan penelitian sekarang, mencakup fokus kajian, kesamaan, dan perbedaannya.

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

No.	Referensi	Fokus Kajian	Kesamaan	Perbedaan
1	UN-Habitat (2019)	Pedoman rekonstruksi hunian pascabencana yang aman, berketahanan, dan berbasis komunitas.	Menekankan keamanan, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat dalam pemulihan hunian.	Bersifat pedoman global; penelitian ini mengkaji kasus spesifik RPP Huntap Sibalaya Selatan.
2	Aldrich (2012)	Peran modal sosial dalam akselerasi pemulihan pascabencana.	Mengakui pentingnya solidaritas, jaringan sosial, dan swadaya masyarakat.	Kajian konseptual modal sosial; penelitian ini mengoperasionalkannya pada program RPP Huntap.
3	Norris et al. (2008)	Resiliensi komunitas sebagai kapasitas ekonomi, sosial, komunikasi, dan kompetensi.	Menyoroti kapasitas komunitas dalam membangun permukiman tangguh bencana.	Bersifat konseptual; penelitian ini menerapkan resiliensi pada empat bidang prioritas RPP.
4	Abe et al. (2018)	Efektivitas metode partisipatif rekonstruksi hunian di Aceh, Yogyakarta, dan Padang.	Menekankan pendekatan partisipatif dan peningkatan kesadaran kebencanaan.	Fokus pada kesadaran bencana; penelitian ini fokus pada RPP sebagai instrumen penataan pascarelokasi.
5	Setiadi et al. (2021)	Rekonstruksi permukiman pascagempa melalui musyawarah komunitas di Yogyakarta.	Membahas rekonstruksi permukiman pascabencana berbasis partisipasi masyarakat.	Konteks pascagempa Yogyakarta; penelitian ini pada konteks pascalikuifaksi Palu 2018.
6	Ansell & Gash (2008)	Tata kelola kolaboratif lintas aktor publik dan non-publik berbasis konsensus.	Relevan dengan pelibatan multiaktor (pemerintah, masyarakat, dinas teknis) dalam RPP.	Bersifat teori umum; penelitian ini mengkaji penerapannya di RPP Huntap Sibalaya Selatan.

Sumber: Olahan penulis (2025).

Sintesis terhadap literatur menunjukkan bahwa pemulihan permukiman pascabencana yang efektif perlu menyandarkan diri pada empat pilar utama, yaitu partisipasi masyarakat, modal sosial, resiliensi komunitas, dan tata kelola kolaboratif. UN-Habitat (2019) menekankan bahwa hunian yang dibangun pascabencana harus memenuhi standar keamanan, keberlanjutan, dan keterlibatan warga, sementara Aldrich (2012) berargumen bahwa kekuatan modal sosial yang dimiliki komunitas justru menjadi faktor yang paling menentukan kecepatan dan kedalaman proses pemulihan itu sendiri. Norris et al. (2008) memandang resiliensi bukan sebagai satu dimensi tunggal, melainkan sebagai gabungan dari empat kapasitas ekonomi, sosial, komunikasi, dan kompetensi yang pembentukannya harus berjalan bersamaan dan saling mengisi. Baik Abe et al. (2018) maupun Setiadi et al. (2021) sampai pada kesimpulan serupa: pendekatan yang mengajak warga terlibat langsung dalam rekonstruksi hunian terbukti menumbuhkan kesadaran terhadap risiko bencana sekaligus memperkuat rasa kepemilikan kolektif; adapun Ansell & Gash (2008) mengingatkan bahwa dalam program yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, keberhasilannya sangat ditentukan oleh seberapa solid tata kelola kolaboratifnya dibangun.

Posisi penelitian ini di antara penelitian terdahulu terletak pada kekhususan objek dan pendekatan integratifnya. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang umumnya berhenti pada aspek hunian atau bersifat konseptual, penelitian ini secara spesifik mengkaji Rencana Penataan Permukiman (RPP) Hunian Tetap (HunTap) Desa Sibalaya Selatan pascalikuifaksi Palu 2018 sebagai instrumen penataan permukiman pascarelokasi. RPP tersebut disusun melalui pendekatan *Community Action Plan* (CAP) dan mengintegrasikan empat bidang prioritas, yaitu infrastruktur, ekonomi, sosial-lingkungan, dan pengurangan risiko bencana (PRB). Dengan demikian, penelitian ini memperluas diskursus rekonstruksi pascabencana dari level hunian ke level penataan permukiman menyeluruh berbasis komunitas.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif partisipatif melalui metode *Community Action Plan* (CAP), yakni sebuah kerangka perencanaan yang berakar pada keterlibatan komunitas, di mana Warga Terdampak Bencana (WTB) ditempatkan sebagai pelaku utama yang aktif menggali kebutuhan, mencari jalan keluar, dan merancang tindakan nyata atas persoalan permukiman yang mereka hadapi (UN-Habitat, 2015). Dalam konteks pemulihan pascabencana, pendekatan ini terbukti relevan karena ia membantu warga membangun kembali jati diri kolektif dan mempererat ikatan sosial di lingkungan hunian yang baru (Wamsler, 2007; Shaw & Sharma, 2011), sekaligus selaras dengan semangat perencanaan yang inklusif sebagaimana diamanatkan dalam Permen PUPR No. 2 Tahun 2016 dan pedoman *Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project* (CSRRP).

Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer mencakup profil demografi WTB, kondisi fisik hunian, serta aspirasi dan kebutuhan warga yang dihimpun langsung melalui kegiatan partisipatif. Data sekunder diperoleh dari dokumen teknis CSRRP/OSP, data spasial wilayah, dokumen pemerintahan desa dan daerah (RPJMDes dan RPJMD Kabupaten Sigi), serta data BPS dan BMKG. Rincian jenis dan sumber data, beserta teknik pengumpulannya, disajikan pada Tabel 2.

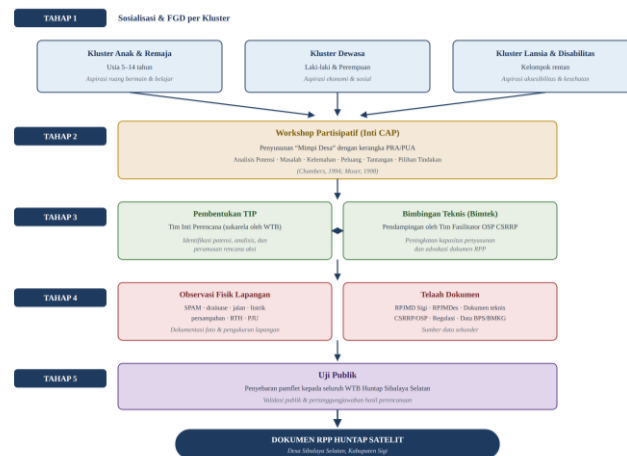
Tabel 2. Jenis Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan.

No.	Jenis Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan
1	Profil demografi WTB (jumlah KK, usia, jenis kelamin, kesejahteraan)	WTB; Pemerintah Desa Sibalaya Selatan	Sensus, wawancara, telaah arsip desa
2	Kondisi fisik huntap (struktur, prasarana, sarana, utilitas)	Lapangan; dokumen teknis CSRRP/OSP	Observasi, dokumentasi foto, telaah dokumen
3	Aspirasi dan kebutuhan warga (potensi, masalah, peluang, tantangan)	WTB per kluster	FGD dan Workshop CAP per kluster
4	Kebijakan dan program pembangunan desa serta daerah	Pemdes; Pemkab Sigi	Konsultasi, telaah RPJMDes/RPJMD
5	Kondisi geografi, topografi, hidrologi, dan iklim	BPS, BMKG, peta tematik	Telaah dokumen dan peta

Sumber: Dokumen RPP Huntap Sibalaya Selatan (2024), diolah

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui enam teknik yang saling melengkapi dan mencerminkan prinsip partisipasi inklusif:



Gambar 1. Alur Teknik Pengumpulan Data RPP Huntap Satelit Sibalaya Selatan.

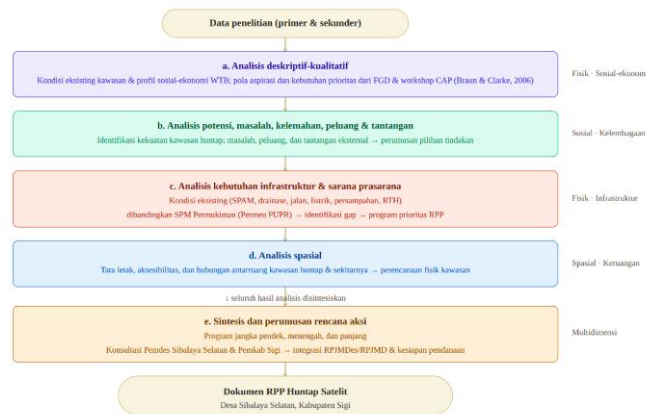
Sumber: Olahan penulis (2026).

Analisis data dilakukan secara multiaspek yang mencakup dimensi fisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Analisis deskriptif-kualitatif digunakan untuk menggambarkan kondisi eksisting kawasan dan profil sosial-ekonomi WTB, sementara data yang diperoleh melalui FGD dan workshop CAP ditelaah menggunakan analisis tematik guna memetakan pola aspirasi warga dan mengangkat isu-isu yang paling mendesak untuk ditangani (Braun & Clarke, 2006). Analisis potensi-masalah-peluang-tantangan diterapkan terhadap temuan CAP guna merumuskan pilihan tindakan yang realistis dan berbasis kebutuhan warga. Analisis kebutuhan infrastruktur dilakukan dengan membandingkan kondisi eksisting prasarana huntap terhadap Standar Pelayanan Minimum (SPM) permukiman, di mana selisih antara kondisi aktual dan standar menjadi dasar perumusan program prioritas. Analisis spasial digunakan untuk memahami tata letak, aksesibilitas, dan keterhubungan antarruang kawasan. Hasil

seluruh analisis disintesis menjadi rencana aksi terstruktur dalam jangka pendek, menengah, dan panjang yang selanjutnya dikonsultasikan dengan Pemdes Sibalaya Selatan dan Pemkab Sigi guna integrasi dengan program pembangunan serta kesiapan pendanaan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan analisis multi aspek yang mencakup dimensi fisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Alur Teknik Analisis Data RPP Huntap Satelit Sibalaya Selatan.

Sumber: Olahan penulis (2026).

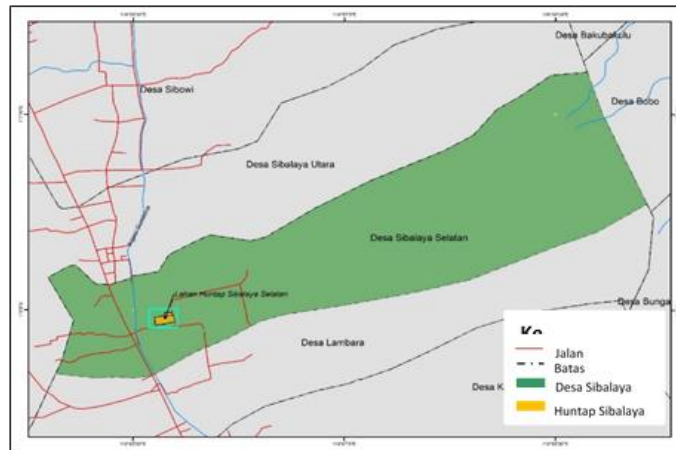
Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu Penelitian

Penyusunan RPP Huntap Satelit Sibalaya Selatan dilaksanakan selama kurang lebih lima bulan, mulai dari bulan Juli 2024 hingga November 2024. Seluruh tahapan penyusunan RPP yang melibatkan WTB dilaksanakan dalam rentang waktu tersebut, mulai dari sosialisasi awal, workshop CAP per cluster, pembentukan dan bimbingan teknis TIP, hingga uji publik dan konsultasi dengan pemerintah desa dan daerah.

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Huntap Satelit Desa Sibalaya Selatan, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Huntap Sibalaya Selatan dihuni oleh 118 kepala keluarga (KK) yang merupakan WTB Desa Sibalaya Selatan korban bencana likuifaksi Palu tahun 2018.



Gambar 3. Peta Desa Sibalaya Selatan.



Gambar 4. Kondisi Huntap Sibalaya Selatan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil Workshop: Matriks Pilihan Tindakan

Melalui metode *Community Action Plan (CAP)*, warga mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan pilihan tindakan yang dikategorikan dalam empat bidang prioritas: infrastruktur, ekonomi, sosial-lingkungan, dan pengurangan risiko bencana (PRB). Setiap pilihan tindakan dinilai dengan skala karakteristik solusi 1–9 (semakin tinggi nilai, semakin kompleks intervensi yang dibutuhkan) dan dilengkapi skala waktu serta sumber pendanaan. Rekapitulasi pilihan tindakan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi Pilihan Tindakan Hasil Workshop CAP per Bidang Prioritas.

No.	Bidang	Pilihan Tindakan Utama	Mitra Pelaksana	Skema Pendanaan	Skala (1–9)
1	Infrastruktur	Pembuatan dan perbaikan drainase; pengadaan lampu jalan (PJU) dan lampu taman	Dinas PU Kab. Sigi, Pemerintah Desa	Pihak lain + swadaya	6–9
2	Ekonomi	Pelatihan vokasi multi-bidang (Disnakertrans); pengadaan bibit anggur, hewan ternak, dan peralatan usaha kecil; penurunan daya listrik	Disnakertrans, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas UMKM, PLN	Pihak lain	2–9
3	Sosial dan Lingkungan	Kerja bakti dan pengelolaan sampah sistem 3R; pengadaan TPS dan kendaraan sampah; pembuatan rambu jalan, pos kamling, dan CCTV; penyediaan WC duduk; pembersihan tandon	Dinas LH Kab. Sigi, Pemerintah Desa, swadaya warga	Kombinasi swadaya dan pihak lain	1–9
4	Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Pelatihan simulasi kebakaran dan tanggap bencana; pengadaan APPAR; titik kumpul dan papan pengarah; penghijauan; pengecekan listrik berkala	BPBD, Satpol-PP, Damkar Kab. Sigi, Pemdes	Kombinasi swadaya dan pihak lain	1–9

Sumber: Hasil Workshop CAP RPP Huntap Satelit Sibalaya Selatan, 8 Juni 2024 (diolah).

Tabel 1 memperlihatkan bahwa rentang nilai skala solusi yang paling lebar ditemukan pada bidang sosial-lingkungan (1–9), yang menandakan keragaman jenis intervensi mulai dari kegiatan swadaya murah seperti kerja bakti (skala 1) hingga kebutuhan yang memerlukan dukungan eksternal signifikan seperti pengadaan kendaraan pengangkut sampah (skala 9). Bidang ekonomi mendominasi dalam hal ketergantungan pada mitra pemerintah, dengan lima dinas kabupaten terlibat sebagai penanggung jawab. Adapun bidang PRB menjadi satu-satunya bidang yang seluruh kegiatan jangka pendeknya dapat dijalankan secara swadaya, mencerminkan kesiapsiagaan berbasis komunitas yang sudah terbentuk sebagai warisan pengalaman bencana likuifaksi 2018.

Potensi Sumber Daya Huntap

Huntap Satelit Sibalaya Selatan dihuni oleh 118 KK dengan total 397 jiwa, di mana 262 jiwa (66%) berusia produktif (136 laki-laki dan 126 perempuan). Komposisi demografi ini merupakan modal manusia yang besar untuk pembangunan kawasan. Namun, struktur pekerjaan didominasi sektor primer dan informal: petani (28), wiraswasta dan pedagang (22), buruh (18), dan sopir (7), sementara sektor formal PNS (4), karyawan swasta (5), guru (3), tenaga kesehatan (3) jumlahnya terbatas. Pola ini mengindikasikan kerentanan ekonomi struktural yang perlu diatasi melalui program diversifikasi mata pencaharian.

Pemetaan keterampilan dan minat warga mengungkapkan kekayaan kompetensi laten yang belum optimal dimanfaatkan. Tabel 4 menyajikan distribusi keterampilan dominan beserta potensi pengembangannya.

Tabel 4. Distribusi Keterampilan Dominan WTB Huntap Satelit Sibalaya Selatan.

No.	Keterampilan	Jumlah (Jiwa)	Potensi Pengembangan
1	Tataboga	47	Wirausaha kuliner; kelompok usaha bersama; pasar lokal dan regional
2	Olahraga (sepak bola + cabang lain)	50	Pembentukan klub komunitas; ajang lomba desa/kecamatan; fasilitas olahraga kawasan
3	Kesenian (menggambar, menari, menyanyi, dll.)	30	Ekonomi kreatif; pelatihan anak dan remaja; festival budaya
4	Perbengkelan dan otomotif	8	Wirausaha jasa servis; kursus pemuda; kemitraan dengan industri
5	Pertukangan	7	Wirausaha konstruksi; pemeliharaan mandiri huntap
6	Menjahit	5	Wirausaha sandang; produksi seragam/pakaian lokal
Total	±157 jiwa (dari 262 jiwa produktif)	59,9%	Lebih dari separuh penduduk produktif memiliki keterampilan laten yang dapat dikembangkan.

Sumber: Survei pemetaan SDM dan Workshop CAP Huntap Sibalaya Selatan (2024).

Keterampilan tataboga (47 jiwa, 18% dari penduduk produktif) merupakan yang paling dominan dan telah terkristalisasi menjadi kelembagaan ekonomi konkret. Kelompok kuliner "Maju Bersama" beranggotakan 10 orang WTB dan non-WTB telah mengikuti pelatihan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah (Juni 2024) serta mewakili Sulawesi Tengah dalam perlombaan kuliner tingkat nasional di Jakarta. Kelompok ini menjadi preseden bahwa modal keterampilan komunitas yang diberi dukungan fasilitasi dapat menembus pasar dan pengakuan di luar kawasan hunian.

Potensi Modal Sosial dan Kelembagaan

Modal sosial Huntap Sibalaya Selatan terwujud dalam dua lapisan. Lapisan pertama adalah jaringan internal warga huntap, yang mencakup pengajian rutin mingguan, grup WhatsApp sebagai saluran informasi dan promosi produk, serta kelompok usaha bersama. Lapisan kedua adalah jembatan dengan masyarakat di luar huntap, yang terjalin melalui kegiatan mengaji lintas-warga (15 murid), keanggotaan 28 WTB dalam kelompok Wanita Tani, pemanfaatan bersama RTH, keterlibatan WTB dalam KSB Desa, dan kelompok kuliner lintas-batas. Konfigurasi dua lapisan ini mencerminkan eksistensi modal sosial pengikat sekaligus modal sosial pen jembatan secara bersamaan.

Pada dimensi kelembagaan, telah terbentuk enam organisasi tingkat huntap yang seluruhnya berstatus aktif, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Kelembagaan Komunitas Aktif di Huntap Satelit Sibalaya Selatan.

No.	Organisasi	Fungsi dan Peran Strategis
1	Kelompok O&P Pengembangan Rumah	Mengkoordinir pengembangan hunian sesuai pedoman rumah tahan gempa dan material bangunan yang aman
2	Kelompok O&P SPAL dan SPAM	Sosialisasi pemeliharaan jaringan air bersih dan sanitasi; koordinasi kerja bakti pembersihan reservoir/tandon utama
3	Kelompok O&P Sampah dan RTH	Sosialisasi pengelolaan sampah sistem 3R, pengelolaan RTH sebagai ruang publik olahraga dan seni
4	Kelompok O&P PSU	Perawatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) melalui kerja bakti dan perbaikan mandiri
5	Kelompok Siaga Bencana (KSB)	Sosialisasi kesiapsiagaan dan praktik penanggulangan bencana kebakaran dan gempa bumi
6	Tim Inti Perencana (TIP)	Mengawal implementasi seluruh program dalam dokumen RPP; advokasi ke tingkat desa dan kabupaten

Sumber: Workshop CAP Huntap Sibalaya Selatan (2024), diolah.

Potensi Fisik, Alam, dan Kapasitas PRB

Aset fisik utama kawasan adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi multifungsi: taman bermain anak, ruang olahraga bersama (senam, sepak bola), dan arena kesenian (latihan tari). Jalan lingkungan juga dimanfaatkan warga untuk jogging dan bersepeda. Pemanfaatan yang melampaui fungsi teknis awal ini menunjukkan bahwa infrastruktur publik huntap telah menjadi ruang produksi sosial sekaligus perekat solidaritas komunitas. Pada dimensi alam, lahan kosong berpotensi dikembangkan sebagai kebun TOGA (Tanaman Obat Keluarga), sedangkan panorama pegunungan membuka peluang agrowisata mikro berbasis komunitas.

Pengalaman langsung sebagai korban likuifaksi 2018 telah membentuk kesadaran kolektif warga akan urgensi kesiapsiagaan bencana. Kapasitas PRB huntap saat ini berwujud dalam dua dimensi yang saling melengkapi: (1) dimensi struktural dikelola Kelompok O&P Pengembangan Rumah yang mengkoordinasi pengembangan hunian sesuai prinsip tahan gempa; dan (2) dimensi non-struktural dijalankan melalui KSB Huntap dan keterlibatan WTB dalam KSB Desa yang aktif mengedukasi warga tentang mitigasi kebakaran dan gempa bumi.

Program Kegiatan dan Skema Pendanaan (2024–2028)

Seluruh pilihan tindakan dari hasil workshop diterjemahkan ke dalam 39 program kegiatan yang dijadwalkan dalam rentang 2024–2028. Tabel 6 merangkum distribusi program dan estimasi anggaran per bidang prioritas.

Tabel 6. Distribusi Program Kegiatan dan Estimasi Anggaran per Bidang (2024–2028).

No.	Bidang	Jumlah Program	Estimasi Anggaran (Rp)	Karakter Pendanaan Dominan
I	Infrastruktur	6 program	18.000.000	Swadaya (jangka pendek) + dinas teknis (jangka menengah)
II	Ekonomi	9 program	127.700.000	Dinas teknis kabupaten (Pertanian, Peternakan, UMKM, Disnakertrans)
III	Sosial dan Lingkungan	15 program	194.900.000*	Kombinasi: swadaya untuk kegiatan rutin, dinas untuk pengadaan fisik
IV	PRB	9 program	Swadaya + BPBD/Satpol-PP	Mayoritas swadaya; dukungan kelembagaan untuk pelatihan dan APPAR
	Total	39 program	± Rp 340.600.000	Multisumber: swadaya, APBDes, APBD Kab. Sigi, pihak ketiga

*Termasuk pembangunan gedung serbaguna Rp129,6 juta dan kendaraan pengangkut sampah.

Rp40 juta Sumber: BAB V Dokumen RPP Huntap Satelit Sibalaya Selatan (2024), diolah.

Bidang Sosial-Lingkungan menyerap program terbanyak (15 program) sekaligus anggaran terbesar (\pm Rp194,9 juta), didorong dua pengadaan fisik skala besar: gedung serbaguna (Rp129,6 juta) dan kendaraan pengangkut sampah (Rp40 juta). Bidang Ekonomi menjadi bidang paling bergantung pada mitra pemerintah, dengan anggaran terpusat pada pengadaan hewan ternak (Rp100 juta dari Dinas Peternakan) dan bibit anggur (Rp17,7 juta). Sementara itu, bidang PRB dirancang hampir sepenuhnya berbasis swadaya, yang secara filosofis memperkuat kemandirian komunitas dalam kesiapsiagaan bencana.

Pembahasan

Modal Sosial sebagai Fondasi Pemulihan yang Berkelanjutan

Apa yang ditemukan di lapangan sejalan dengan apa yang diyakini Aldrich (2012): bahwa modal sosial bukan sekadar pelengkap, melainkan penggerak utama yang mendorong roda pemulihan berputar setelah bencana. Namun, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan mengidentifikasi mekanisme spesifik konversi modal sosial menjadi kapital ekonomi dalam konteks pascarelokasi. Kelompok kuliner Maju Bersama merupakan ilustrasi yang paling jelas: jaringan sosial lintas-batas yang terbentuk secara organik antara WTB dan warga non-WTB berhasil dikonversi menjadi unit wirausaha yang mampu menembus kompetisi nasional. Ini bukan sekadar pemulihan ke kondisi semula, melainkan sebuah lompatan kapabilitas yang mendemonstrasikan kekuatan pendekatan partisipatif.

Lebih jauh, penelitian ini menemukan dimensi yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur pemulihan pascabencana, yaitu modal sosial berbasis teknologi digital. Grup WhatsApp huntap yang berfungsi ganda sebagai saluran komunikasi komunitas sekaligus

platform promosi produk wirausaha merupakan bentuk infrastruktur sosial baru yang efisien dan berbiaya rendah. Temuan ini sekaligus memperkaya dan memperluas gagasan Aldrich (2012) dengan menghadirkan satu dimensi yang sebelumnya belum mendapat perhatian memadai: peran jaringan digital sebagai salah satu wujud modal sosial yang semakin relevan bagi komunitas yang tengah menapaki kehidupan baru di lokasi relokasi.

Empat Pilar Resiliensi: Dari Konsep Menuju Operasionalisasi

Norris dkk. (2008) menyebut ada empat kapasitas yang membentuk resiliensi komunitas: ekonomi, sosial, komunikasi, dan kompetensi. Yang menarik dari temuan penelitian ini adalah bahwa keempat kapasitas tersebut tidak hanya bisa diamati di Huntap Sibalaya Selatan, tetapi juga bisa diukur dan dibandingkan satu sama lain meski masing-masing berada pada tahap perkembangan yang berbeda.

Tabel 7. Operasionalisasi Empat Kapasitas Resiliensi di Huntap Satelit Sibalaya Selatan.

Kapasitas	Wujud Empiris	Tingkat Kematangan
Kapasitas Ekonomi	66% penduduk usia produktif; 157 jiwa (59,9%) memiliki keterampilan laten; kelompok usaha aktif; program diversifikasi mata pencaharian	Sedang potensi besar namun masih bertumpu pada sektor informal yang rentan
Kapasitas Sosial	6 organisasi aktif tingkat huntap; keanggotaan di 7 organisasi desa; relasi lintas-batas WTB dan non-WTB	Tinggi jaringan multi-lapis sudah terbentuk dan berjalan aktif
Kapasitas Komunikasi	Forum tatap muka (pengajian, kerja bakti, workshop CAP); grup WhatsApp sebagai saluran digital	Tinggi kombinasi saluran luring dan daring sudah terintegrasi
Kapasitas Kompetensi	TIP yang terlatih; 5 Kelompok O&P yang menjalankan fungsi pemeliharaan mandiri; KSB aktif	Sedang kapasitas teknis sudah ada, namun perlu penguatan pasca-pendampingan CSRRP

Sumber: Adaptasi dari Norris dkk. (2008), berdasarkan data lapangan Huntap Sibalaya Selatan (2024).

Temuan penting dari operasionalisasi ini adalah bahwa keempat kapasitas tidak berdiri sendiri, melainkan bekerja dalam sistem yang saling memperkuat: kapasitas sosial yang kuat menyediakan wadah bagi perkembangan kapasitas ekonomi; kapasitas komunikasi yang efektif memungkinkan koordinasi antar kelompok; sementara kapasitas kompetensi memberikan keahlian teknis untuk mengelola aset fisik dan sosial secara berkelanjutan. Konfigurasi ini menunjukkan bahwa Huntap Sibalaya Selatan telah melampaui fase bertahan hidup dan memasuki fase pemulihan adaptif tahap di mana komunitas tidak hanya pulih ke kondisi semula, tetapi membangun kapasitas baru.

Tata Kelola Kolaboratif: Komunitas sebagai Agen, Bukan Objek

Distribusi penanggung jawab dalam matriks pilihan tindakan (Tabel 1) menunjukkan keterlibatan setidaknya 10 mitra kelembagaan yang berbeda mencakup pemerintah desa, delapan dinas kabupaten, BPBD, Satpol-PP, dan Damkar di samping warga sendiri. Kehadiran belasan mitra dari berbagai latar belakang kelembagaan ini bukan sekadar kebetulan, melainkan cerminan dari tata kelola kolaboratif yang dikonseptualisasikan oleh Ansell dan Gash (2008): suatu pola di mana pihak-pihak di luar pemerintah dilibatkan secara bermakna, keputusan diambil melalui musyawarah dalam forum CAP, dan hasilnya dimiliki bersama oleh semua pihak yang terlibat.

Yang membedakan kasus Sibalaya Selatan dari model perencanaan top-down pada umumnya adalah peran TIP. TIP bukan sekadar perwakilan warga yang dihadirkan sebagai formalitas, melainkan berfungsi sebagai agen tata kelola yang mengawal implementasi RPP di tingkat desa sekaligus melakukan advokasi ke DPRD dan dinas kabupaten. Posisi ini memungkinkan RPP terintegrasi dengan RPJMDes dan RPJMD Kabupaten Sigi sebuah mekanisme pengarusutamaan dari bawah ke atas yang selama ini menjadi titik lemah program rekonstruksi pascabencana di Indonesia. Temuan ini memperkuat apa yang ditegaskan Shaw & Sharma (2011) bahwa permukiman yang benar-benar bertahan dalam jangka panjang hanya akan terwujud jika warga diperlakukan sebagai mitra aktif di setiap tahapan perencanaan bukan hanya ketika bencana baru saja terjadi dan bantuan darurat sedang mengalir.

Refleksi Kritis: Empat Ketegangan Struktural

Sekalipun temuan menunjukkan profil kawasan yang kondusif, terdapat empat ketegangan struktural yang perlu diantisipasi agar pencapaian yang ada dapat dipertahankan dan dikembangkan lebih lanjut.

Ketegangan pertama berkaitan dengan kerentanan ekonomi struktural. Meskipun 66% penduduk berusia produktif, dominasi pekerjaan informal (petani, buruh, wiraswasta kecil) menempatkan kawasan dalam kondisi rentan terhadap guncangan ekonomi. Program pengadaan hewan ternak (Rp100 juta) dan bibit anggur (Rp17,7 juta) merupakan langkah yang tepat, namun perlu diiringi pendampingan teknis pertanian dan akses pasar agar tidak berhenti pada pengadaan fisik semata.

Ketegangan kedua adalah risiko kejenuhan pasar keterampilan tataboga. Konsentrasi 47 jiwa (18% penduduk produktif) pada satu keterampilan mengandung risiko persaingan internal dan kejenuhan pasar lokal. Kelompok Maju Bersama perlu didorong untuk mengembangkan produk khas bernilai tambah tinggi yang berorientasi pasar regional, bukan

hanya pasar huntap, misalnya melalui branding produk khas pascabencana Palu yang memiliki nilai narasi.

Ketegangan ketiga menyangkut keberlanjutan kelembagaan pascapendampingan CSRRP. Seluruh enam organisasi huntap tumbuh dalam ekosistem pendampingan eksternal OSP CSRRP. Ketika program berakhir, terdapat risiko hilangnya momentum apabila tidak ada mekanisme transfer kapasitas yang terencana kepada kelembagaan desa yang definitif (pemerintah desa dan BPD). Dokumen RPP seharusnya dilengkapi dengan strategi keberlanjutan yang konkret, termasuk alokasi anggaran pemeliharaan di APBDes.

Ketegangan keempat terletak pada ketidakseimbangan antara kapasitas PRB non-struktural dan struktural. Dari sembilan program PRB, tujuh di antaranya berbasis edukasi dan swadaya, sementara kebutuhan struktural seperti titik kumpul dan APPAR baru direncanakan pada 2025–2026. Padahal, kerentanan fisik huntap terhadap bencana bersifat menetap dan tidak menunggu jadwal. Pengadaan infrastruktur PRB yang bersifat fisik-struktural perlu segera diakselerasi, sebab prinsip membangun kembali dengan lebih baik yang diusung UN-Habitat (2019) menggarisbawahi bahwa upaya pengurangan risiko tidak boleh diperlakukan sebagai tambahan di luar rekonstruksi, melainkan harus menjadi bagian yang menyatu dalam setiap langkahnya.

Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara keseluruhan, RPP Huntap Satelit Sibalaya Selatan dapat dipahami bukan sekadar sebagai dokumen perencanaan teknis, melainkan sebagai kerangka kerja resiliensi terintegrasi yang menjembatani empat bidang prioritas dengan modal sosial dan kapasitas kelembagaan yang telah terbentuk. Pendekatan ini menghadirkan pergeseran paradigma yang bermakna: dari hunian sebagai produk pembangunan menuju permukiman sebagai sistem sosio-ekologis yang hidup dan berkembang. Dari sudut pandang teoritis, kontribusi penelitian ini terletak pada kemampuannya menunjukkan bahwa tiga kerangka konseptual Aldrich (2012) soal modal sosial, Norris dkk. (2008) tentang resiliensi komunitas, dan Ansell serta Gash (2008) mengenai tata kelola kolaboratif tidak beroperasi secara terpisah-pisah, melainkan saling melengkapi dan memperkuat ketika dihadapkan pada konteks nyata di tingkat kawasan permukiman. Secara praktis, model perencanaan partisipatif berbasis CAP yang dijalankan di Sibalaya Selatan berpotensi menjadi rujukan replikasi bagi kawasan huntap pascabencana lain di Indonesia, dengan catatan bahwa setiap konteks lokal memiliki modal sosial dan kapasitas kelembagaan yang berbeda sehingga memerlukan adaptasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa RPP Huntap Satelit Sibalaya Selatan berhasil berfungsi sebagai instrumen perencanaan partisipatif yang melampaui penyediaan hunian fisik. Melalui metode CAP, dokumen RPP mengintegrasikan empat bidang prioritas infrastruktur, ekonomi, sosial-lingkungan, dan pengurangan risiko bencana dalam 39 program kegiatan senilai ±Rp340,6 juta untuk periode 2024–2028. Tiga temuan utama penelitian ini adalah: Pertama, modal sosial komunitas huntap yang terwujud dalam enam organisasi aktif, jaringan lintas-batas dengan warga sekitar, dan infrastruktur komunikasi digital telah berhasil dikonversi menjadi kapital ekonomi konkret, sebagaimana dibuktikan oleh Kelompok Kuliner Maju Bersama yang menembus kompetisi nasional. Kedua, seluruh kapasitas resiliensi yang dirumuskan Norris et al. (2008) meliputi dimensi ekonomi, sosial, komunikasi, dan kompetensi dapat diidentifikasi secara konkret di Huntap Sibalaya Selatan: kapasitas sosial dan komunikasi telah berkembang dengan baik, sementara kapasitas ekonomi dan kompetensi masih membutuhkan penguatan yang lebih serius ke depannya. Ketiga, TIP berfungsi sebagai agen tata kelola kolaboratif yang mengintegrasikan RPP ke dalam RPJMDes dan RPJMD Kabupaten Sigi, memperlihatkan mekanisme pengarusutamaan perencanaan dari bawah ke atas yang selama ini menjadi kelemahan program rekonstruksi pascabencana di Indonesia.

Berdasarkan temuan dan empat ketegangan struktural yang diidentifikasi, penelitian ini merumuskan empat saran operasional. Pertama, Pemerintah Desa dan Pemkab Sigi perlu memprioritaskan pendampingan teknis dan akses pasar bagi kelompok usaha bukan sekadar pengadaan modal fisik guna mengatasi kerentanan ekonomi struktural komunitas yang masih bertumpu pada sektor informal. Kedua, Kelompok Maju Bersama perlu difasilitasi pengembangan produk khas bernilai tambah tinggi berorientasi pasar regional melalui branding berbasis narasi pascabencana Palu, guna mengantisipasi risiko kejenuhan pasar tataboga lokal. Ketiga, sebelum program CSRRP berakhir, perlu disusun strategi keberlanjutan kelembagaan yang konkret mencakup transfer kapasitas TIP dan kelompok O&P kepada pemerintah desa serta alokasi anggaran pemeliharaan dalam APBDes agar momentum resiliensi yang telah dibangun tidak melemah. Keempat, percepatan pengadaan infrastruktur PRB struktural (titik kumpul, APPAR, papan pengarah) perlu dijadikan prioritas tahun 2024–2025, jangan menunggu jadwal semula di 2026 karena prinsip membangun kembali dengan lebih baik secara tegas menempatkan pengurangan risiko bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai inti dari setiap upaya rekonstruksi.

DAFTAR REFERENSI

- Abe, M., Shaw, R., & Djalante, R. (2018). Participatory approaches for post-disaster reconstruction in Indonesia: Lessons from Aceh, Yogyakarta, and West Sumatra. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 27, 429–441. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2017.10.025>
- Aldrich, D. P. (2012). *Building resilience: Social capital in post-disaster recovery*. University of Chicago Press. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226012896.001.0001>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2018). *Laporan kejadian bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi Sulawesi Tengah 2018*. BNPB.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023). *Indeks risiko bencana Indonesia 2023*. BNPB.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Djalante, R., Holley, C., Thomalla, F., & Carnegie, M. (2013). Pathways for adaptive and integrated disaster resilience. *Natural Hazards*, 69(3), 2105–2135. <https://doi.org/10.1007/s11069-013-0797-5>
- Ge, Y., Dou, W., & Liu, N. (2017). Planning for resettlement: A survey of community relocation in China. *Habitat International*, 65, 65–73. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2017.05.004>
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2016). *Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2016 tentang peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh*. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Khambali, I. (2022). *Manajemen penanggulangan bencana berbasis komunitas*. Penerbit ANDI.
- Lizarralde, G., Johnson, C., & Davidson, C. (Eds.). (2010). *Rebuilding after disasters: From emergency to sustainability*. Spon Press. <https://doi.org/10.4324/9780203892572>
- Mayunga, J. S. (2007). Understanding and applying the concept of community disaster resilience: A capital-based approach. *Summer Academy for Social Vulnerability and Resilience Building*, 22(1), 1–16.
- Norris, F. H., Stevens, S. P., Pfefferbaum, B., Wyche, K. F., & Pfefferbaum, R. L. (2008). Community resilience as a metaphor, theory, set of capacities, and strategy for disaster readiness. *American Journal of Community Psychology*, 41(1–2), 127–150. <https://doi.org/10.1007/s10464-007-9156-6>
- Oliver-Smith, A. (1991). Successes and failures in post-disaster resettlement. *Disasters*, 15(1), 12–23. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7717.1991.tb00425.x>
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.

- Setiadi, R., Diposaptono, S., & Yulianto, E. (2021). Community-based post-earthquake resettlement through deliberative planning: Lessons from Yogyakarta. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 55, Article 102088. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102088>
- Shaw, R., & Sharma, A. (Eds.). (2011). *Climate and disaster resilience in cities*. Emerald Group Publishing. [https://doi.org/10.1108/S2040-7262\(2011\)6](https://doi.org/10.1108/S2040-7262(2011)6)
- Twigg, J. (2015). *Disaster risk reduction: Good practice review 9*. Humanitarian Practice Network, Overseas Development Institute.
- United Nations Human Settlements Programme. (2015). *Community action planning for post-disaster reconstruction: A guide for practitioners*. UN-Habitat.
- United Nations Human Settlements Programme. (2019). *A practical guide for conducting housing needs assessments in post-disaster contexts*. UN-Habitat.
- Wamsler, C. (2007). Managing urban risk: Perceptions of housing and planning as a tool for reducing disaster risk. *Global Built Environment Review*, 6(2), 11–28.
- Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I. (2004). *At risk: Natural hazards, people's vulnerability and disasters* (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203974575>
- Yunus, H. S. (2019). *Metodologi penelitian wilayah kontemporer*. Pustaka Pelajar.